



## LINGKUNGAN USAHA

### PENDAHULUAN

Data yang ada menunjukkan bahwa sejak berakhirnya krisis keuangan Asia 1997/98, Indonesia terus mengalami laju pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia berhasil meminimalkan dampak negatif dari krisis ekonomi global pada periode 2008-09, dan hingga saat ini efek dari krisis hutang zona Euro terhadap perekonomian Indonesia kelihatan masih relatif kecil. Hal ini memberi kesan bahwa Indonesia sekarang ini lebih siap menghadapi krisis-krisis ekonomi global, dibandingkan semasa era Orde Baru saat diterpa oleh krisis keuangan Asia. Namun berbeda dengan era Orde Baru, sumber dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sejak akhir krisis ekonomi Asia hingga saat ini masih didominasi oleh konsumsi domestik. Lebih rendahnya kontribusi dari ekspor dan pembentukan modal tetap (investasi) terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional selama ini dibandingkan pada era Orde Baru bisa memberi indikasi bahwa kegiatan ekonomi di sisi suplai (produksi dan investasi) di dalam negeri pada era pasca-Orde Baru lebih lesuh. Bahkan sejak awal reformasi hingga saat ini, walaupun terus tumbuh dan lajunya cenderung meningkat, arus penanaman modal tetap dari luar negeri (PMA) ke Indonesia relatif masih lebih lambat dibandingkan pada masa Orde Baru. Indonesia bukan lagi merupakan pilihan paling favorit bagi PMA, khususnya untuk industri-industri yang bersifat footloose, dibandingkan dengan negara-negara sekitar seperti Viet Nam, China, Malaysia dan Thailand.

Sekarang pertanyaan-pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Indonesia relatif semakin tertinggal dibandingkan dengan China, Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya sejak berakhirnya krisis keuangan Asia 1997/98? Apa yang menyebabkan Indonesia bukan lagi merupakan tujuan utama di Asia



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

Tenggara untuk PMA? Apa yang menyebabkan barang-barang dan sejumlah jasa dari China semakin menguasai pasar dalam negeri Indonesia? Apa yang membuat Indonesia semakin sulit menjadi salah satu pemain kunci di dalam perdagangan dunia? Apa yang membuat Indonesia belum mampu terlibat aktif sebagai salah satu pemasok besar di dalam produksi regional atau global? Tentu banyak sekali faktor, baik yang berdiri sendiri maupun yang saling terkait, yang mempengaruhi, secara langsung dan tidak langsung, kemampuan Indonesia untuk muncul sebagai salah satu ekonomi kunci, jika bukan sebagai ekonomi terbesar, di dalam perekonomian regional atau bahkan ekonomi global. Diantara faktor-faktor tersebut adalah sejumlah faktor yang menciptakan lingkungan usaha yang bisa menyokong, atau sebaliknya, menghambat, perkembangan kegiatan bisnis (investasi, produksi, dan ekspor) di Indonesia.

Tujuan utama dari policy paper ini adalah menganalisis lingkungan bisnis yang berlaku belakangan ini di Indonesia, dengan memberi perhatian khusus pada salah satu faktor penentunya, yakni biaya dan waktu yang diperlukan untuk membuka suatu usaha di Indonesia. Analisis ini didasarkan pada hasil-hasil laporan dari dua lembaga dunia, yakni laporan tahunan mengenai biaya dari melakukan usaha, Doing Business, dari Bank Dunia (IFC), laporan tahunan mengenai daya saing, Global Competitiveness Report, dari World Economic Forum (WEF), dan hasil survei dari LPEM-UI tahun 2006.

### **DEFINISI DAN KONSEP**

Secara umum, lingkungan bisnis atau usaha dapat didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang berlaku yang bisa mendorong atau, sebaliknya, menghambat perkembangan dan pertumbuhan kegiatan-kegiatan usaha di semua sector, atau, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan dari sebuah perusahaan (<http://www.quantum3.co.za/CI%20Glossary>). Berdasarkan literatur (a.l. Mathew, 2009), Secara umum, sesuai sifatnya dilihat dari sisi perusahaan atau pelaku usaha, lingkungan usaha bisa dibedakan antara lingkungan internal, atau yang



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

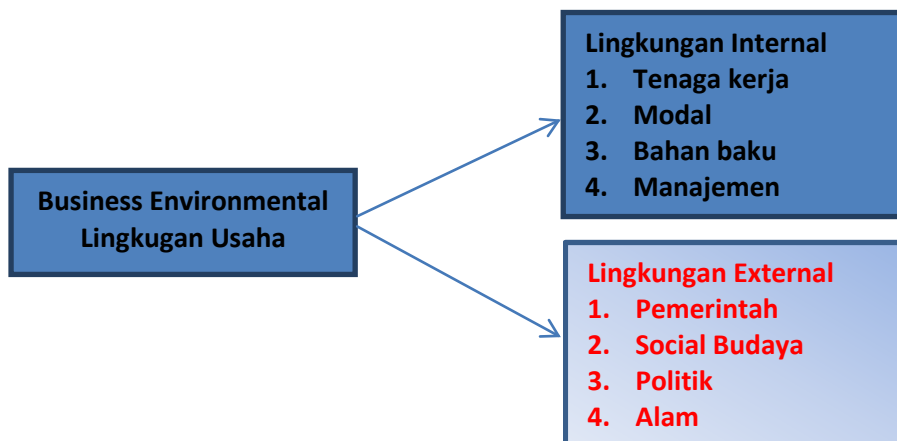
---

terjadi di dalam sebuah perusahaan yang sepenuhnya bisa dikontrol oleh perusahaan, dan lingkungan eksternal, yang terjadi di luar perusahaan yang sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 1, elemen-elemen dari lingkungan internal adalah manusia, yakni pekerja dan pimpinan, material atau bahan baku, modal baik untuk pembiayaan kegiatan usaha sehari-hari (modal kerja) maupun untuk perluasan usaha (modal investasi), mesin dan peralatan produksi (yang mengandung teknologi tertentu) dan proses atau sistem manajemen yang diterapkan. Walaupun faktor-faktor tersebut bisa dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan, dalam kenyataan sehari-hari, faktor-faktor tersebut tidak tertutup dari pengaruh dari lingkungan eksternal. Misalnya, ketentuan upah minimum bisa berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan, yang berarti menciptakan lingkungan internal yang tidak kondusif lewat faktor tenaga kerja. Atau contoh lainnya, kelangkaan bahan baku seperti yang pernah dialami oleh produsen-produsen meubel dari rotan akibat kebijakan pemerintah waktu itu yang memperbolehkan ekspor rotan mentah menciptakan lingkungan internal yang tidak kondusif lewat faktor material.

Sedangkan lingkungan usaha eksternal terdiri dari enam elemen besar, yakni pemerintah, faktor-faktor legal, faktor-faktor geo-fisik, faktor-faktor politik, faktor-faktor sosial-budaya, dan faktor-faktor kependudukan atau demografi. Ke enam elemen ini sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan secara individu; bahkan faktor-faktor geo-fisik sama sekali diluar kontrol manusia. Selanjutnya, seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 1, ada dua macam lingkungan eksternal, yakni lingkungan mikro, yakni yang berhubungan langsung dengan kegiatan sebuah perusahaan atau berpengaruh langsung terhadap kegiatan sebuah usaha, yang disebut juga lingkungan operasi, dan, lingkungan makro yang mempengaruhi tetapi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan sebuah perusahaan.

Lingkungan eksternal mikro terdiri dari pemasok bahan baku, alat-alat produksi, dan lainnya; pembeli (masyarakat dan usaha; dalam dan luar negeri), perantara (dalam pemasaran, distribusi dan pendanaan); dan masyarakat/publik

(termasuk media). Sedangkan lingkungan eksternal makro terdiri dari dua kelompok besar, yakni ekonomi dan non-ekonomi. Lingkungan eksternal makro dari aspek ekonomi memiliki tiga sub-elemen kunci yakni kondisi perekonomian masyarakat (diantaranya adalah tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, kesenjangan dalam distribusi pendapatan, jumlah orang miskin, rasio antara kelompok masyarakat menengah-bawah dan kelompok masyarakat atas, dll.), kebijakan-kebijakan ekonomi (diantaranya yang paling penting adalah kebijakan fiskal-moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan investasi, kebijakan harga, kebijakan industri dan sector-sektor lainnya) dan sistem ekonomi (terbuka vs. tertutup; liberal vs. proteksi), dan (2) non-ekonomi seperti politik, sosial-budaya, alam, teknologi, demografi, dan internasional.



**Gambar 1. Lingkungan Usaha Menurut Sifat**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan usaha yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di suatu ekonomi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor secara bersamaan, dan prosesnya bisa sangat kompleks karena sebagian besar dari faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi. Misalnya, sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara sangat

ditentukan oleh sistem politik yang dianut oleh negara tersebut, bahkan tidak lepas dari pengaruh dari sosial-budaya masyarakatnya. Dalam menganalisis motivasi dibalik keinginan Indonesia selama ini untuk tetap bergabung di dalam kelompok ASEAN dan APEC, harus juga dilihat sistem politik yang dianut Indonesia selama ini dan juga sosial-budaya masyarakat Indonesia yang memang sudah sejak era pra-kolonialisasi sangat terbuka dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian juga dalam menganalisis kenapa di Indonesia selama ini dalam membuka suatu usaha baru memerlukan lebih banyak waktu dan biaya dan prosedurnya lebih ruwet dibandingkan dengan di, misalnya Singapura. Sistem pemerintahan khususnya aspek birokrasinya dan sosial budaya masyarakat Indonesia (serius vs. tidak serius, komitmen vs. tidak komitmen, disiplin vs. tidak disiplin, etos kerja rendah vs. tinggi, dan lainnya) harus merupakan dua variabel penting (bahkan variabel kunci) di dalam analisisnya.



**Gambar 2. Lingkungan Usaha Eksternal**



## LINGKUNGAN USAHA DI INDONESIA: FAKTA

### Gambaran Umum

Lingkungan usaha yang kondusif bagi perkembangan sektor swasta dalam suatu perekonomian adalah lingkungan yang menyediakan kualitas hukum, regulasi dan penataan kelembagaan yang dapat memungkinkan usaha untuk memiliki daya saing, pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja yang maksimal. Berbagai penelitian (World Bank, 2010, 2012, LPEM, 2006) menegaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan sektor swasta yang optimal sangat membutuhkan adanya institusi hukum yang dapat menjamin perlindungan atas *property rights*, serta peraturan dan regulasi yang efisien dan transparan, yang dapat meminimalkan biaya registrasi dan biaya transaksi yang harus ditanggung perusahaan. Konstelasi institusional yang *business-friendly* ini merupakan lingkungan usaha yang memudahkan pelaku usaha di sektor swasta untuk memulai usaha, berinvestasi, mengalami pertumbuhan serta menciptakan lapangan usaha.

Mungkin penelitian yang paling komprehensif dan rutin setiap tahun hingga saat ini mengenai lingkungan usaha di Indonesia adalah dari Bank Dunia/IFC yang diterbitkan dalam laporannya berjudul *Doing Business*. Dalam menganalisis tingkat kondusifitas dari lingkungan usaha di suatu ekonomi, Bank Dunia menggunakan 11 indikator, yaitu: (1) memulai suatu usaha (prosedur, modal minimum yang wajib, waktu dan biaya); (2) registrasi properti (prosedur, waktu dan biaya); (3) mendapatkan kredit (sistem informasi kredit; undang-undang kolateral yang bergerak); (4) perlindungan terhadap investor (penyikapan dan pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis), (5) pelaksanaan kontrak dan penyelesaian insolvabilitas (prosedur, waktu dan biaya untuk penyelesaian sebuah pertikaian komersial); (6) mendapatkan ijin konstruksi (prosedur, waktu dan biaya); (7) mendapatkan listrik (prosedur, waktu dan biaya); (8) pembayaran pajak-pajak (cara pembayaran, waktu, dan jumlah); (9) perdagangan lintas perbatasan (dokumen-dokumen, waktu dan biaya); (10)



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

memperkerjakan pekerja; dan (11) penyelesaian insolvabilitas (waktu, biaya dan tingkat pemulihan).

Dalam *Doing Business in Indonesia 2012* (WB&IFC, 2012), penelitian Bank Dunia difokuskan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukaan suatu usaha baru, ekspansi usaha, perolehan kredit usaha, dan insolvensi. Khusus untuk pembukaan usaha baru, laporan Bank Dunia itu memberikan suatu pengukuran kuantitatif dari regulasi-regulasi nasional dan lokal untuk memulai suatu usaha baru yang berurusan dengan izin-ijin konstruksi dan pendaftaran properti yang diberlakukan bagi semua skala usaha di Indonesia. Ada dua macam data yang dijabarkan di dalam laporan tersebut. Tipe data pertama didapat dari membaca semua regulasi dan undang-undang yang ada yang berkaitan dengan membuka suatu usaha baru. Tipe data kedua adalah indikator-indikator waktu dan pergerakan yang mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan dari suatu peraturan (misalnya memberikan identitas legal dari sebuah usaha). Diantara indikator-indikator waktu dan pergerakan, dibuat estimasi-estimasi biaya berdasarkan tarif-tarif resmi yang ada.

Dalam laporan *Doing Business* tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ke 129 dari 183 negara yang disurvei Bank Dunia. Didalam kelompok negara Asean, Filipina paling rendah peringkatnya yakni 136 dan Singapura tertinggi nomor 1, disusul kemudian oleh Thailand 17, Malaysia 18, Viet Nam 98. Dalam lima tahun terakhir laporan *Doing Business*, peringkat Indonesia dalam kondusivitas lingkungan usaha relatif tidak bertambah baik. Walaupun demikian, telah terjadi perbaikan bila dilihat dari jumlah hari dan jumlah prosedur yang harus dilalui pengusaha saat memulai usaha baru.



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

Tabel 1. Peringkat, Jumlah Hari dan Jumlah Prosedur  
dalam Membuka Suatu Usaha Baru di ASEAN, 2012

Negara	Peringkat	Hari	Prosedur	Biaya(% thd Pendapatan /kapita)
Singapura	1	3	3	0,7
Thailand	17	29	5	6,2
Malaysia	18	6	4	16,4
Brunai	83	101	15	11,8
Vietnam	98	44	9	10,6
Indonesia	129	45	8	17,9
Filipina	136	35	15	19,2
Kamboja	138	85	9	109,7
Laos	165	93	7	7,6

Sumber: Doing Business 2012

Namun demikian, menurut laporan tersebut, Indonesia termasuk negara paling aktif di Asia dalam melakukan reformasi untuk memperbaiki lingkungan usaha dalam beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan database Bank Dunia mengenai Doing Business, selama periode 2005-2009 pemerintah Indonesia telah melakukan 11 reformasi yang memberikan efek positif terhadap lingkungan usaha. Hal ini yang juga membuat peringkat Indonesia membaik 7 poin ke peringkat 122. Untuk tiga aspek usaha yang menjadi fokus dari Doing Business in Indonesia 2010 tersebut, beberapa reformasi telah berhasil menyederhanakan prosedur dan mengurangi waktu dan biaya memulai usaha baru. Sebuah peraturan pemerintah pusat telah menghilangkan keharusan mendapatkan suatu sertifikat mengenai domisili perusahaan dari pemerintah Kabupaten. Reformasi lainnya yakni registrasi pajak online juga mengurangi waktu secara signifikan. Juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini yang terkait dengan perijinan usaha telah mengurangi waktu dan biaya untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sebagai salah satu hasilnya, waktu yang diperlukan untuk membuka/memulai suatu usaha





Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

baru di Jakarta berkurang 16 hari dan biaya juga berkurang sekitar 52 persen dari pendapatan per kapita (WB&IFC, 2010).

Tabel 2. Peringkat, Jumlah Hari dan Jumlah Prosedur dalam Membuka Suatu Usaha Baru di Indonesia

Posisi Indonesia	2008	2009	2010	2011	2012
Peringkat	123	129	122	121	129
Hari	105	76	60	47	45
Prosedur	12	11	9	9	8

Sumber: Doing Business 2008-2012

Untuk mengurangi lamanya waktu pengurus registrasi property, pemerintah Indonesia juga sudah menentukan batas waktu, yakni satu hari kerja untuk mengeluarkan sertifikat kepemilikan, dan 5 hari kerja untuk registrasi, yang membuat jumlah waktu yang diperlukan untuk mentransfer sebuah properti di Jakarta berkurang 17 hari, dari 39 ke 22 hari. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat persyaratan-persyaratan penyikapan untuk transaksi-transaksi antara orang-orang dalam perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang mereka kontrol untuk melindungi investor-investor asing.

Untuk studi Bank Dunia ini, dilakukan survei di 14 kota di Indonesia, dan hasilnya bisa dilihat di Tabel 3, yang menunjukkan bahwa memulai suatu usaha baru paling mudah di DI Yogyakarta (peringkat 1) dan paling sulit di Manado (peringkat 14). Studi ini juga mengkaji prosedur-prosedur yang berlaku, waktu dan besarnya biaya untuk mendapatkan ijin-ijin membangun sebuah gudang penyimpanan/grosir dan menemukan bahwa prosesnya paling efisien di DI Yogyakarta (hanya 8 prosedur dibandingkan 14 prosedur untuk Indonesia yang diwakili oleh Jakarta) dan paling tidak efisien di Surabaya. Terakhir, proses pendaftaran properti paling efisien di Bandung dan paling tidak efisien di Balikpapan (di dalam laporan tersebut, bisa dilihat prosedur-prosedur tersebut dengan biaya resmi dan waktu yang diperlukan di masing-masing kota tersebut).



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

Tabel 3. Peringkat dalam Kemudahan Membuka Suatu Usaha Baru, Mendapatkan Ijin-ijin Membangunan dan Pendaftaran Properti dari 14 Kota di Indonesia

Kota	Membuka Usaha Baru	Mendapatkan Ijin-Ijin Membuat Bangunan	Pendaftaran Properti
Balikpapan	8	8	14
Banda Aceh	6	10	8
Bandung	5	3	1
Denpasar	10	11	8
Jakarta	7	13	2
Makassar	9	2	10
Manado	14	12	3
Palangka Raya	3	3	5
Palembang	4	6	6
Pekanbaru	11	7	4
Semarang	13	5	11
Surabaya	11	14	6
Surakarta	2	9	13
Yogyakarta	1	1	12

Sumber: dikutip dari Tabel 1.1 di WB&IFC (2010)

Berdasarkan fakta di atas tersebut, pertanyaan sekarang adalah: kenapa di dalam suatu ekonomi yakni Indonesia, bisa terjadi perbedaan dalam tingkat efisiensi menyangkut tiga aspek lingkungan usaha tersebut antar kota? Paling tidak secara teori, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam banyak variabel antar daerah. Variabel-variabel tersebut termasuk jumlah penduduk, luas wilayah (kedua variabel tersebut menentukan tingkat kepadatan penduduk dan berarti juga luas wilayah yang tersedia untuk kegiatan ekonomi/bisnis seperti lokasi pabrik), tingkat pendapatan/kesejahteraan masyarakat (termasuk kesejahteraan pejabat/pegawai negeri yang mempengaruhi besar-kecilnya pungutan-pungutan liar/yang sebenarnya tidak diperlukan dan korupsi), tingkat partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi atau kewirausahaan (yang terefleksikan antara lain oleh jumlah pengajuan ijin usaha dan bangunan serta peralihan/registrasi properti), dan budaya-sosial masyarakat (yang terefleksikan oleh antara lain tingkat disiplin, komitmen, etos kerja, rasa malu melakukan korupsi, produktivitas dan kepatuhan pegawai negeri daerah, proses penegakan



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

hukum), dan modal sosial (yang terefleksikan oleh antara lain tingkat kerjasama dan kontrol sosial di dalam masyarakat). Sebagian dari variabel-variabel tersebut mencerminkan keunikan atau kearifan dari sebuah daerah/kota

Regulasi dan prosedur usaha yang tidak efisien dan transparan selanjutnya turut mempengaruhi tingginya tingkat informalitas usaha di Indonesia. Ketiga faktor ini: waktu, biaya dan akses terhadap informasi, dapat dikategorikan sebagai biaya transaksi yang harus dihadapi usaha di sektor informal untuk dapat memperoleh formalitas usaha. Laporan Doing Business 2010 menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh regulasi usaha yang efisien dan transparan memiliki tingkat *entry rate* yang tinggi. Sementara tingginya tingkat *barriers to entry* dalam suatu perekonomian umumnya berkaitan erat dengan tingginya tingkat korupsi, dan selanjutnya dengan besarnya sektor informal dalam ekonomi.

Laporan kedua yang relevan untuk dibahas di dalam tulisan ini adalah laporan tahunan mengenai daya saing global dari negara-negara/ekonomi-ekonomi di dunia dari World Economic Forum (WEF). Daya saing dalam pengertian WEF ini adalah daya saing suatu negara/ekonomi, bukan daya saing suatu produk. Tentu daya saing yang tinggi dari suatu negara akan sangat membantu daya saing dari produk-produk dari negara tersebut; namun demikian, daya saing suatu produk juga ditentukan oleh sejumlah faktor baik internal seperti nilai tukar (walaupun pergerakan nilai tukar tidak sepenuhnya internal), tingkat suku bunga yang mempengaruhi biaya produksi/investasi, produktivitas, dan lain-lain. dan eksternal seperti struktur pasar global, dan lain-lain. Metodologi yang digunakan oleh WEF untuk menentukan daya saing global sebuah negara adalah suatu kombinasi antara analisis data sekunder dan data primer yang meliputi sejumlah aspek yang secara teoritis dianggap sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing suatu negara/ekonomi, dan dalam penghitungan dengan rumus-rumus tertentu masing-masing aspek/faktor tersebut diberi bobot-bobot tertentu yang besarnya didasarkan pada `signifikansi dari pengaruh dari aspek bersangkutan. Data sekunder diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya, sedangkan data primer adalah hasil survei terhadap pengusaha-



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

pengusaha/pimpinan-pimpinan perusahaan, seperti yang telah dijelaskan di atas, disebut Executive Opinion Survey.

Tabel 4. 12 Pilar dari Daya Saing Negara/Ekonomi

Kelompok pilar/Tiga sub-Indeks	Kunci untuk:
Persyaratan dasar: 1.Kelembagaan 2.Infrastruktur 3.Stabilitas ekonomi makro 4.Kesehatan dan pendidikan dasar	FAKTOR PENDORONG EKONOMI <i>(factor driven; FAD)</i>
Pendorong efisiensi: 5.Pendidikan tinggi dan pelatihan 6.Efisiensi pasar barang dan jasa 7.Efisiensi pasar tenaga kerja 8.Kecanggihan pasar keuangan 9.Kesiapan teknologi 10.Luas pasar domestik	FAKTOR PENDORONG EFISIENSI <i>(efficiency driven; EFD)</i>
Faktor-faktor inovasi dan kecanggihan 11.Kecanggihan bisnis 12.Inovasi	FAKTOR PENDORONG INOVASI <i>(innovation-driven; ID)</i>

Sumber: Tambunan (2011)

Ada tiga kelompok faktor-faktor (tiga sub-indeks) yang menentukan tingkat/indeks daya saing sebuah negara (Tabel 4). Pertama, persyaratan-persyaratan dasar seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi (stabilitas) ekonomi makro dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Faktor-faktor ini dianggap sebagai motor utama penggerak proses/pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, faktor-faktor ini sudah terbukti berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelompok kedua adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan efisiensi (atau produktivitas) ekonomi seperti pendidikan tinggi dan pelatihan (kualitas sumber daya manusia), kinerja pasar yang efisien, dan kesiapan teknologi di tingkat nasional maupun perusahaan secara individu, dan luas pasar domestik. Kelompok ketiga adalah faktor-faktor inovasi dan kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan yang secara bersama menentukan tingkat inovasi suatu negara.

Setiap tahun Indonesia ikut dalam survei WEF untuk penentuan peringkat Indeks Daya Saing Global atau Global Development Index (GCI) yang hasilnya



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

diterbitkan dalam laporan tahunan dari WEF, The Global Competitiveness Report (GCR). Untuk survei di Indonesia, WEF bekerjasama dengan Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Usaha, Universitas Triskti dan Kadin Indonesia, dapat dilihat Tabel 5 memperlihatkan posisi Indonesia dalam daya saing global untuk periode 2008-2011. Sedangkan hasil untuk periode 2011-2012 diperlihatkan di Tabel 6.

Tabel 5: GCI versi WEF dari negara-negara ASEAN, 2008-2009 – 2010-2011

Negara Anggota	Peringkat ASEAN			Peringkat Dunia		
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2008-2009 (132)	2009-2010 (133)	2010-2011 (139)
Singapura	1	1	1	5	3	3
Malaysia	2	2	2	21	24	26
Brunei Darussalam	4	3	3	39	32	28
Thailand	3	4	4	34	36	38
Indonesia	5	5	5	55	54	44
Vietnam	6	6	6	70	75	59
Filipina	7	7	7	71	87	85
Kambodia	8	8	8	109	110	109

Sumber: WEF (2008, 2009, 2010)

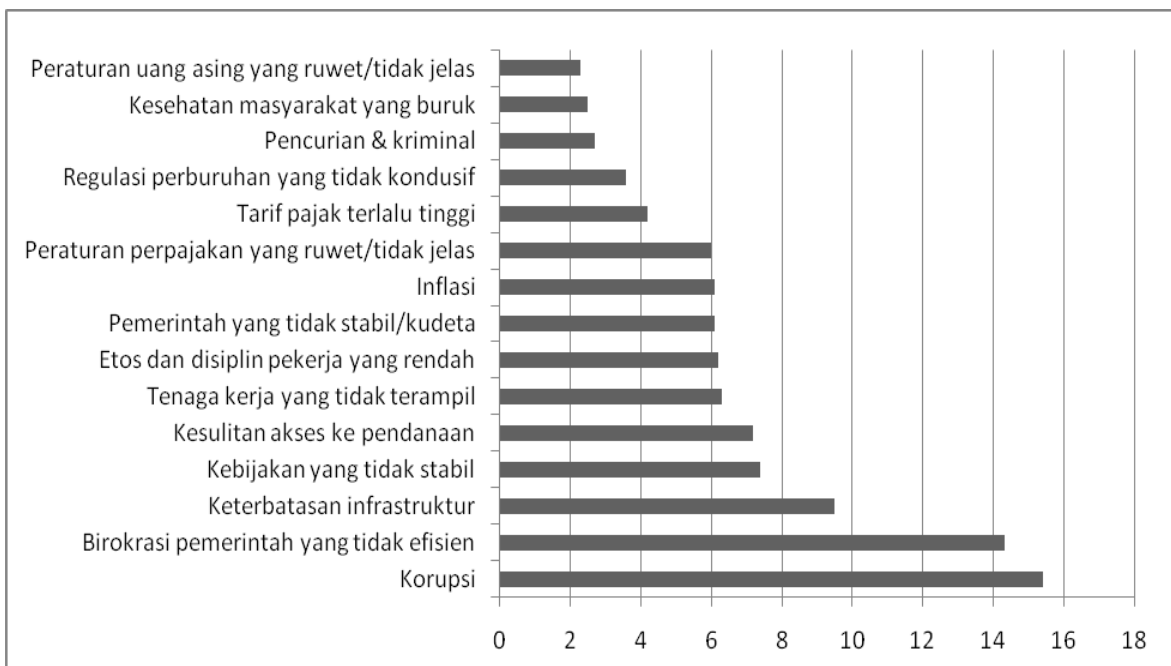
Tabel 6: GCI versi WEF dari negara-negara ASEAN, 2011-2012

GCI	Peringkat (dari 142 negara)
	46
Persyaratan dasar (40%)	53
1.Kelembagaan	71
2.Infrastruktur	76
3.Stabilitas ekonomi makro	23
4.Kesehatan dan pendidikan dasar	64
Pendorong efisiensi (50%)	56
5.Pendidikan tinggi dan pelatihan	69
6.Efisiensi pasar barang dan jasa	67
7.Efisiensi pasar tenaga kerja	94
8.Kecanggihan pasar keuangan	69
9.Kesiapan teknologi	94
10.Luas pasar domestik	15
Faktor-faktor inovasi dan kecanggihan (10%)	41
11.Kecanggihan bisnis	45
12.Inovasi	36

Sumber: WEF (2011)

Selain itu, di dalam survei, para responden yakni pimpinan perusahaan/ceo dari semua skala usaha (termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti PT Garuda Indonesia dan Blue Bird) dan di sektor-sektor besar (berdasarkan pangsa PDB) seperti industri, pertanian, pertambangan dan perdagangan ditanya mengenai kendala-kendala utama yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha di Indonesia. Hasilnya diperlihatkan di Gambar 3.

Pada Gambar 3 diperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa korupsi dan efisiensi birokrasi merupakan dua kendala serius yang membuat biaya berusaha di Indonesia relatif mahal.



Gambar 3: Kendala-kendala Utama Melakukan Usaha di Indonesia (Opini Responden), 2011-2012 (%)

Sumber: WEF (2011)

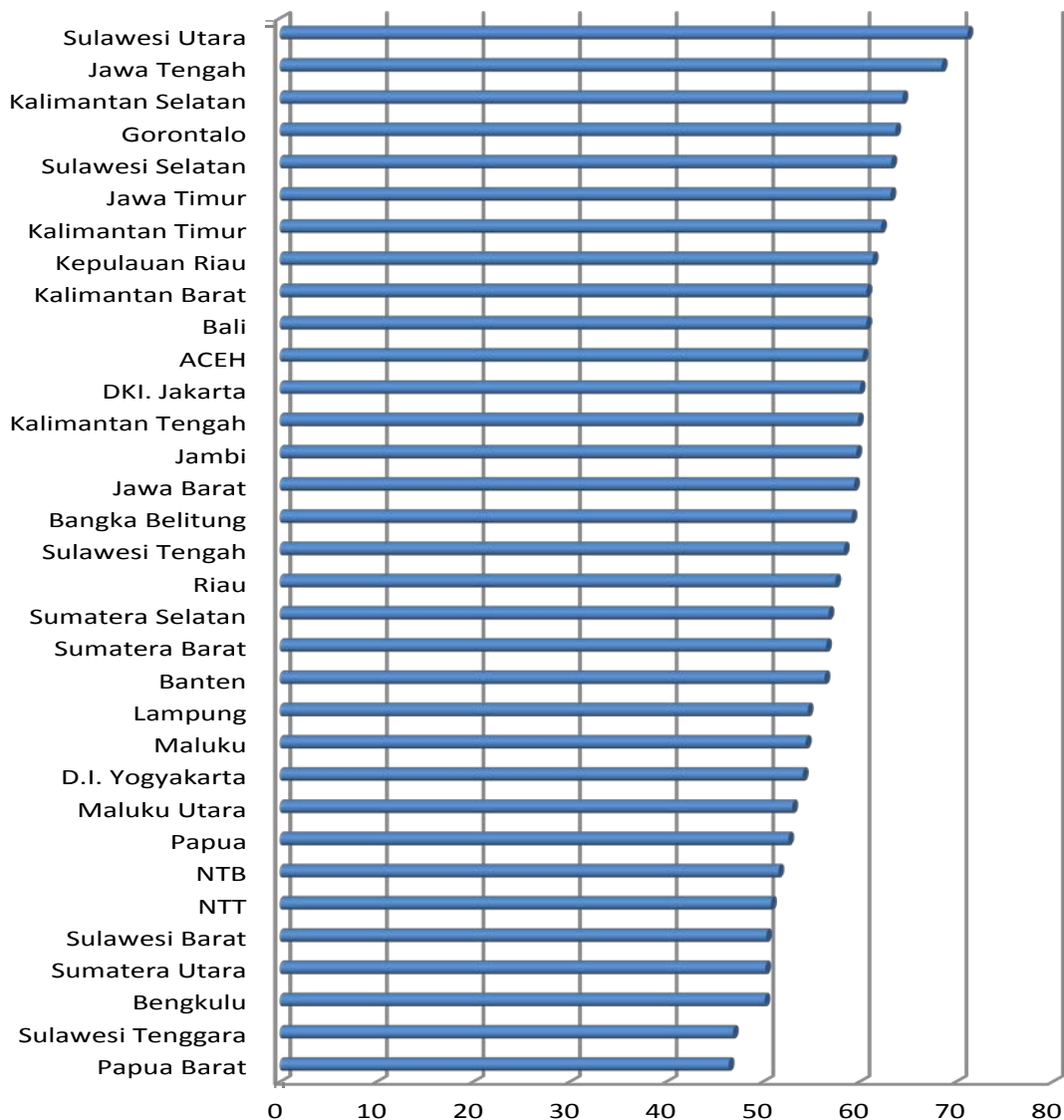


## **Iklm Investasi Wilayah**

Di tingkat provinsi, iklim investasi menurut hasil survey KPPOD dan BKPM, bahwa iklim usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang terkait satu sama lain, dengan derajat pengaruh berbeda antar faktor. Studi KPPOD dan BKPM ditetapkan sembilan indikator survei pemeringkatan iklim usaha di Provinsi yakni: (1) Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal, (2) Promosi Investasi Daerah, (3) Komitmen Pemda, (4) Infrastruktur, (5) Akses Lahan Usaha, (6) Tenaga Kerja, (7) Keamanan Usaha, (8) Kinerja Ekonomi Daerah, dan (9) Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah.

Dalam studinya, salah satu temuan pokok adalah dimana terdapat 4 (empat) Provinsi luar Pulau Jawa mendominasi 5 peringkat teratas, dan hanya satu Provinsi di pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berhasil. Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan dan memiliki potensi pariwisata, perikanan dan perkebunan, menempati peringkat tertinggi untuk nilai total indeks iklim investasi. Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik di seluruh indikator penilaian, utamanya pada indikator Akses Lahan (82,51), Komitmen Pemda dalam Pengembangan Dunia Usaha (72,85) dan Kelembagaan IPMP (72,59). Dengan akses lahan yang mudah, didukung komitmen Pemda dalam mengembangkan dunia usaha dan kelembagaan pelayanan investasi menjamin hadirnya iklim usaha yang baik.

### Indeks Iklim Investasi



Gambar 4: Peringkat Iklim Investasi di Wilayah Indonesia.

Sumber: KPPOD dan BKPM, 2008.

Provinsi Papua Barat menempati peringkat terendah indeks iklim investasi daerah, hal ini dicerminkan karena rendahnya fasilitas infrastruktur, akses lahan yang kurang mendukung, dan keamanan berusaha yang belum terjamin. Rendahnya iklim investasi secara simultan membuat kinerja ekonomi daerah





kurang maksimal, dan sulit merangsang keterlibatan swasta dalam perekonomian daerah yang kurang. Meskipun demikian, di beberapa daerah, komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dunia usaha relative masih rendah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

1. Regulasi/peraturan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan usaha, khususnya pembukaan usaha baru, masih belum efisien dan efektif walaupun pemerintah telah mengupayakannya selama ini.
  - a. Oleh karena itu, upaya pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu terus mengupayakan penyederhanaan semua regulasi/peraturan secara lebih serius, terutama dalam tataran pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama baik antar departemen, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara pemerintah dengan dunia usaha, khususnya Kadin dan semua asosiasi bisnis harus dioptimalkan.
  - b. Upaya reformasi regulasi/peraturan usaha, khususnya dalam pembukaan usaha baru, perlu dilakukan dengan dasar efisiensi dan transparansi. Efisiensi regulasi/peraturan diarahkan untuk dapat meminimalkan cakupan total hari, total prosedur, dan total biaya resmi maupun tidak resmi yang ditanggung oleh perusahaan. Transparansi regulasi/peraturan diarahkan untuk dapat meningkatkan akses pengusaha, termasuk pengusaha kecil dan menengah, terhadap informasi yang tersedia. Penerapan sistem *on-line* yang terintegrasi menjadi salah satu solusi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
  - c. Upaya reformasi regulasi/peraturan usaha juga perlu dirancang dengan memperhatikan aspek kesetaraan akses usaha-usaha kecil dan menengah yang mayoritas masih belum berbadan hukum terhadap formalisasi usaha dan kredit usaha.



2. Pelaksanaan regulasi/peraturan yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan usaha (khususnya pembukaan usaha baru) di lapangan, sering menyimpang dari pada aturan yang ditetapkan. Maka perlu adanya suatu lembaga dengan tujuan utamanya adalah, selain memonitor substansi dari semua regulasi/peraturan terkait, juga memonitor pelaksanaannya di lapangan. Lembaga ini akan berfungsi seperti KPPOD dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan anti monopoli atau persaingan sehat dan adil, atau KPK dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Dalam hal ini, KADIN/KADINDA dapat mengambil peran tersebut.
  
3. Lingkungan investasi di daerah masih relatif tidak kondusif di banyak daerah.
  - a. Untuk meningkatkan kondusivitas lingkungan usaha bagi investasi, diperlukan komitmen pemerintah dalam pengembangan dunia usaha untuk merangsang investor masuk ke daerah. Komitmen ini dapat dicerminkan dari penyediaan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Menjadi masalah klasik bahwa Infrastruktur menjadi kendala utama pengembangan usaha, Sehingga direkomendasi kepada pemerintah untuk merumuskan ara untuk memperbaiki infrastuktur fisik agar lebih dapat diandalkan dan dapat melayani seluruh wilayah tanah air.
  
  - b. Keamanan berusaha dan konflik sosial di sekitar lokasi usaha dipandang sebagai kendala oleh pelaku usaha. Sehingga disarankan kepada Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengatasi berbagai gangguan keamanan dan konflik yang terjadi di daerah, guna memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku usaha yang berusaha sendiri dalam mengamankan kegiatan usaha mereka dengan cara membayar biaya keamanan tambahan kepada berbagai pihak. Tentunya hal ini merupakan tambahan biaya bagi mereka yang dapat menekan daya saing.



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE)  
Programme

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2008. Peningkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008. KPPOD dan BKPM, Jakarta. Indonesia
- Kuncoro, Ari, et.al. (2007), Monitoring Investment Climate in Indonesia (Round 3): A Report from the Mid of 2006 Survey, LPEM Working Paper No. 15, LPEM-FE UI, Jakarta.
- Mathew, Mercy (ed.) (2009), *Case Studies on Business Environment – Vol. 1*, IBS Case Development Center, Andhra Pradesh, India.
- Tambunan, Tulus T.H. (2011), “DAYA SAING GLOBAL INDONESIA: *WORLD ECONOMIC FORUM 2011-2011*”, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, USAKTI, Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H. (2011), “Perkembangan UMKM di Indonesia: Apakah Mereka Digerakkan oleh Jiwa Kewirausahaan?”, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, USAKTI, Jakarta
- WB&IFC (2012), *Doing Business in Indonesia 2012*, Washington, D.C.: The World Bank and The International Financial Corporation.
- WB&IFC (2011), *Doing Business in Indonesia 2011*, Washington, D.C.: The World Bank and The International Financial Corporation.
- WB&IFC (2010), *Doing Business in Indonesia 2010*, Washington, D.C.: The World Bank and The International Financial Corporation.
- WB&IFC (2009), *Doing Business in Indonesia 2009*, Washington, D.C.: The World Bank and The International Financial Corporation.
- WB&IFC (2008), *Doing Business in Indonesia 2008*, Washington, D.C.: The World Bank and The International Financial Corporation.
- WEF (2008), *The Global Competitiveness Report 2008-2009*, Geneva: World Economic Forum
- WEF (2009), *The Global Competitiveness Report 2009-2010*, Geneva: World Economic Forum
- WEF (2010), *The Global Competitiveness Report 2010-2011*, Geneva: World Economic Forum
- WEF (2011), *The Global Competitiveness Report 2011-2012*, Geneva: World Economic Forum.